



Buletin Parlementaria



DPR Awasi Seluruh Pelaksanaan Haji 1444 H



3 Tingkatkan Solidaritas dan Keadilan di Momen Idul Adha



4 Hari Bhayangkara Momentum Hargai Jasa dan Pengabdian Polri

Nomor 1252/IV/VI/2023 • Juni 2023



9 772614 339005



Media DPR RI

DPR Awasi Seluruh Pelaksanaan Haji 1444 H



Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat memimpin Timwas Haji DPR di Kota Makkah, Arab Saudi.

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI bekerja keras mengawasi penyelenggaraan haji agar berjalan baik, pelayanan kepada para jemaah haji Indonesia terlaksana dengan maksimal. Adapun, tergabung dalam timwas, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta agar pemerintah sebagai penyelenggara haji segera melakukan perbaikan-perbaikan.

"Kami harapkan dengan evaluasi ini, ada perbaikan-perbaikan dari sisi catering, pemondokan, transportasi, kesehatan. Kami akan selalu mengawasi dan mengawal sampai selesai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini," ujar Ashabul di Kantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Madinah di Arab Saudi, Kamis (22/6).

”

KAMI DARI TIMWAS HAJI ADA KEKHAWATIRAN-KEKHAWATIRAN KEPADA JEMAAH HAJI, APALAGI CUACA TAHUN INI KAN SANGAT PANAS.

Soal kesehatan menjadi sorotan, dimana timwas telah mendapatkan informasi dari Tim Petugas Kesehatan Haji Indonesia dalam persiapan jelang puncak ibadah haji nanti. Adapun tenaga kesehatan yang disiapkan tersebut dengan rincian 16 orang petugas kesehatan di Arafah, Muzdalifah 42 orang di Muzdalifah, dan 169 orang di Mina. Sehingga, total ada 227 petugas kesehatan untuk

melayani jemaah haji Indonesia.

"Kami dari Timwas Haji ada kekhawatiran-kekhawatiran kepada jemaah haji, apalagi cuaca tahun ini kan sangat panas. Sehingga kita harapkan, mudah-mudahan dengan kehadiran para tenaga kesehatan ini dapat melindungi para jemaah haji di dalam melaksanakan kegiatan semua rangkaian puncak haji," ujar Ashabul.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Anggota Timwas Haji DPR RI, Ace Hasan Syadzily, membeberkan beberapa temuan terkait pelaksanaan haji 2023. Hal pertama yang dikritisi adalah mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi.

Kang Ace, begitu ia biasa disapa, menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi.

Kemudian Kang Ace menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina. Dia menilai distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jemaah yang kelaparan dan letih. Sedangkan cukup banyak jemaah haji lansia yang turut serta, namun fasilitas bagi mereka tidak optimal.

Berdasarkan catatan itu, Kang Ace meminta pemerintah meninjau ulang mashariq. Dia meminta pemerintah menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas pelayanan mashariq yang bermasalah. "Setelah musim Haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini," pungkasnya.

jk,oji/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya





Tingkatkan Solidaritas dan Keadilan di Momen Idul Adha

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat Indonesia memaknai perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dengan semangat berbagi yang akan mendorong untuk saling berbagi beban. Ia juga mengajak masyarakat bersyukur karena momen Idul Adha kali ini dapat dirayakan bertepatan dengan keluarnya Indonesia dari status pandemi Covid-19.

"Idul Adha adalah momen penuh makna di mana umat muslim di seluruh dunia mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim atas kesetiaannya kepada Allah SWT," kata Puan, Rabu (28/6). Ia pun

mengingatkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

Puan mengatakan, Idul Adha menjadi pengingat tentang semangat keadilan. "Melalui semangat Idul Adha kita tingkatkan gotong royong, rasa solidaritas dan keadilan serta memperkuat kerukunan antar umat beragama," ujarnya.

Di momen Idul Adha, Puan juga mengajak masyarakat Indonesia merefleksikan nilai-nilai sosial dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Salah satu caranya dengan memberikan hewan kurban sebagai perwujudan rasa syukur serta meningkatkan iman dan takwa, terutama untuk masyarakat yang memiliki rezeki berlebih.

"Keikhlasan dalam berkorban merupakan wujud rasa syukur dalam meningkatkan takwa kita kepada Sang Pencipta," tutur Puan..

— aha

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.



Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI
SPEAKER

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: PRIMA



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, Balegys Maeshyntha, Anju Afronco Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Irandi, Runi Sari Budluti, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldio Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Hari Bhayangkara Momentum Hargai Jasa dan Pengabdian Polri



FOTO: MPR/PDI

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus mengatakan bahwa Hari Bhayangkara merupakan kesempatan untuk menghargai jasa dan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Hari Bhayangkara adalah momen penting yang tidak hanya memperingati berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tetapi juga merupakan kesempatan untuk menghargai jasa dan

pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Lodewijk di Jakarta, Minggu (2/7).

Diketahui, saat upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-77 di di GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/7), Lodewijk dengan rasa hormat dan kebanggaan yang tinggi, mengucapkan selamat Hari Bhayangkara kepada anggota Polri serta keluarga besar Polri di seluruh Indonesia.

Tema peringatan Hari Bhayangkara Ke-77, yaitu Polri Presisi untuk Negeri. Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas menggambarkan komitmen Polri dalam menjalankan

tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Selamat Hari Bhayangkara Ke-77! Mari kita jadikan Polri Presisi untuk negeri, dan melalui pemilu damai, kita menuju Indonesia Emas," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Menurutnya, Polri Presisi merupakan konsep kerja yang diterapkan oleh Polri dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta menjamin penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Dalam rangka pemilihan umum (pemilu) mendatang, Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan damai dan bebas dari intimidasi. Pemilu damai merupakan fondasi penting bagi Indonesia sebagai negara demokratis.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri tentunya akan berupaya keras untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pemilu, sehingga rakyat dapat mengungkapkan hak suaranya tanpa rasa takut ataupun tekanan.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, dia mengimbau seluruh anggota Polri agar terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kerja sama dengan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas mulia ini. "Saya juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung dan bekerja sama dengan Polri dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan di negeri ini," kata Anggota Komisi I DPR RI ini. 



Ajak Jemaah Haji Doakan RI Selamat dan Damai



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat membantu jemaah haji Indonesia (27/6/2023).

Jemaah haji dari seluruh dunia hari ini mulai bergerak dan berkumpul di Padang Arafah, Mekkah. Lantunan talbiah sepanjang malam hingga pagi ini terus dilafalkan 2,5 juta jemaah haji di tempat mustajab itu, termasuk oleh 229 ribu jemaah calon haji Indonesia. Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar bersyukur seluruh Jemaah Haji dapat bersama-sama melaksanakan Wukuf di Arafah sebagai rukun utama ibadah Haji.

"Alhamdulillah seluruh Jemaah haji hari ini memasuki puncak haji, yaitu wukuf di Arafah. Di mana al hajju Arafah. Kita semua akan

”

**SELAMAT KEPADA
SELURUH JEMAAH HAJI,
TERUTAMA YANG DARI
INDONESIA.**

melaksanakan satu rukun Haji yang paling pokok yaitu berkumpul di Padang Arafah," kata Wakil Ketua DPR RI ini, Selasa (27/6).

Legislator Fraksi PKB yang akrab disapa Gus Imin ini menyatakan, Padang Arafah adalah tempat paling mustajab untuk berdoa. Pun demikian waktu pelaksanaan Wukuf di Arafah merupakan waktu

paling istijabah. "Di situlah kita akan bertemu satu keadaan doa yang terkabul di tempat yang terkabul. Kita mendapatkan keyakinan dan cerita dari para Kiai bahwa tidak ada tempat dan waktu yang sama untuk dikabulkan doanya kecuali di waktu Arafah," tutur Gus Imin.

la lantas mengajak seluruh jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah wukuf Arafah untuk mendoakan Indonesia agar senantiasa diberi kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap warganya. "Selamat kepada seluruh Jemaah haji, terutama yang dari Indonesia. Tetap khusuk beribadah, jaga kesehatan, dan mari kita mendoakan keluarga, handai taulan, sahabat, saudara, serta rakyat Indonesia secara umum agar diberi keselamatan, kesehatan, kedamaian, serta kesejahteraan bersama," tukas Gus Imin.

Sementara itu, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Subhan Cholid mengatakan, total ada 209.782 jemaah haji reguler yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini. Seluruh jemaah Indonesia itu kini sudah berada di Makkah bersama jutaan jemaah haji dari berbagai negara. "Seluruh jemaah haji Indonesia sudah berada di Makkah untuk bersiap menjalani prosesi puncak haji di Arafah-Muzdalifah-Mina," ujar Subhan.

Para jemaah Indonesia itu akan diberangkatkan ke Arafah secara bertahap mulai pukul 07.00 hingga 24.00 Waktu Arab Saudi (WAS). Pemberangkatan telah dijadwalkan sedemikian rupa agar pergeseran ratusan ribu jemaah haji ini bisa berjalan tertib dan lancar.

oji/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Dukung RUU Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa agar Diratifikasi

Anggota Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung RUU Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa agar diratifikasi. Ia menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut perlu dibahas bersama pemerintah terlebih dulu.

Hal ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR bersama sejumlah akademisi, pakar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Gedung Parlemen,

”

TETAPI INI KAN PERLU KESEPAKATAN DENGAN NEGARA DALAM HAL INI PEMERINTAH, JADI MEMANG TAHAPANNYA MASIH PANJANG ADA RDPU DAN RDP, BARU SETELAHNYA KAMI AKAN RAPAT KERJA DENGAN PEMERINTAH UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN.

Jakarta, Senin (19/6).

“Tetapi ini kan perlu kesepakatan dengan negara dalam hal ini pemerintah, jadi memang tahapannya masih panjang ada RDPU dan RDP, baru setelahnya kami akan Rapat Kerja dengan pemerintah untuk mengambil keputusan. “Jadi sebetulnya secara prinsip tidak ada alasan untuk tidak meratifikasi (mengesahkan) RUU ini,” terang Teuku Riefky.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyampaikan harapannya agar Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa bisa diratifikasi pada tahun 2024.

“Secara umum saya kira sebagai kemajuan dari langkah pengakuan ratifikasi kita kepada konvensi HAM internasional, sudah delapan kita akui ini yang ke-9. Sepatunya ini

dibisa kita lakukan di tahun 2024 mendatang,” harapnya.

Seperti yang diketahui 98 Negara telah menandatangani Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, dan ada 59 Negara yang sudah meratifikasi.

— tn/aha



FOTO:MRN/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR bersama sejumlah akademisi, pakar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ongku Hasibuan: Mafia Tanah Libatkan Multi Stakeholder

Itu pasti melibatkan banyak orang, tetapi tentunya orang itu bukan institusi, orang itu adalah oknum-oknum tetapi dari institusi, oknum dari institusi tertentu yang berwenang untuk menindak atau menyelesaikan, karena mereka ada di dalam, otomatis mereka ada konflik kepentingan, maka terjadilah mafia,” ujar Ongku di Pekanbaru, Riau, Senin (26/6).

Ongku mengatakan jika tidak ada mafia, maka persoalan tanah sengketa akan sangat mudah diselesaikan, tidak mungkin masyarakat yang telah memiliki sertifikat hak milik bisa dibatalkan begitu

saja oleh perusahaan yang bersengketa.

“Sertifikat hak milik itu dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini adalah Menteri Pertanahan pada saat itu, kalau PT tersebut punya IUPHHK-HTI harusnya BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat, tetapi sekarang BPN sudah mengeluarkan sertifikat sedangkan itu sudah disebut lahan HTI, hal tersebut yang harus dicek yang mana yang lebih dulu terbit,” ujar Ongku.

Menurutnya jika surat sudah dikeluarkan oleh institusi negara kemudian dibatalkan oleh institusi

negara lainnya, maka terjadi ‘mafia’ disini, sehingga bisa memenangkan pengadilan dari pengadilan tingkat 1 sampai dengan PK. Sehingga ia mempertanyakan siapapihak yang adadibelakang PT DSI sehingga dia bisa menang terus padahal lawannya sudah punya sertifikat. ➡ eno/aha

”

ITU PASTI MELIBATKAN BANYAK ORANG, TETAPI TENTUNYA ORANG ITU BUKAN INSTITUSI, ORANG ITU ADALAH OKNUM-OKNUM TETAPI DARI INSTITUSI, OKNUM DARI INSTITUSI TERTENTU YANG BERWENANG UNTUK MENINDAK ATAU MENYELESAIKAN, KARENA MEREKA ADA DI DALAM, OTOMATIS MEREKA ADA KONFLIK KEPENTINGAN, MAKA TERJADILAH MAFIA.



FOTO: ENO/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan saat mengikuti pertemuan di Pekanbaru, Riau, Senin (26/6/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Soroti Pengawasan terhadap WNA di Bali, Sahroni: Dirjen Imigrasi Ambil Langkah Konkret!

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyoroti perihal maraknya Warga Negara Asing

(WNA) bermasalah di Indonesia, khususnya wilayah Bali. Menurutnya, dengan segala instrumen yang dimiliki Dirjen Imigrasi, seharusnya Imigrasi dapat melakukan langkah-langkah konkret guna lakukan pengawasan terhadap para WNA.

"Tapi kita juga ada beberapa catatan khusus untuk Pak Dirjen beserta jajaran. Belakangan ini banyak sekali kasus WNA bermasalah, baik yang viral ataupun yang tidak (viral). Terutama ini banyak terjadi di Bali, mereka berbuat seenaknya, seperti tidak menghargai norma dan aturan yang berlaku di negara kita. Dari mulai pelanggaran lalu lintas sampai asusila, ada semua itu," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6).

Apalagi, lanjut Sahroni, di Jakarta juga banyak ditemukan para pencari suaka yang tidak jelas kehidupan dan statusnya, bahkan ada juga yang menjadi pengamen. Sahroni meminta kepada Dirjen Imigrasi untuk menyikapi persoalan ini secara baik dengan tindakan-tindakan yang konkret.

"Bahkan tidak usah jauh-jauh, di Jakarta sendiri ini banyak sekali *refugee* yang tidak jelas kehidupan dan statusnya, bahkan ada yang jadi pengamen. Jadi tolong Pak Dirjen sikapi ini secara betul-betul, terapkan mekanisme pengawasan

”

TAPI KITA JUGA ADA BEBERAPA CATATAN KHUSUS UNTUK PAK DIRJEN BESERTA JAJARAN. BELAKANGAN INI BANYAK SEKALI KASUS WNA BERMASALAH, BAIK YANG VIRAL ATAUPUN YANG TIDAK (VIRAL).

dan penindakan yang konkret. Jangan sampai harus tunggu laporan masyarakat dan polisi," desaknya.

Sahroni juga menyoroti masalah yang melibatkan oknum di Imigrasi. Sebab hal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penghambat bagi

imigrasi. Oleh karena itu, Sahroni meminta Dirjen imigrasi turut menertibkan para oknum guna mewujudkan kinerja imigrasi yang lebih maksimal.

"Saya minta Pak Dirjen usut oknum-oknum yang bermain di Imigrasi. Soalnya mereka ini jelas menghambat kinerja imigrasi. Namun Pak Dirjen harus hati-hati, penyelidikannya harus dipisah, jangan *full bucket*. Ketahui dahulu mereka ini oknum mafia atau oknum yang bekerja secara sistematis-struktural dari dalam," tutupnya. ➡ [we/rdn](#)



FOTO: ENO/PDT

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi III Minta Polda NTT Tingkatkan Pengawasan Kasus Peredaran Narkoba

Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi NTT untuk meningkatkan pengawasan terhadap kasus peredaran Narkoba. Sebab, ia menilai, peredaran barang haram tersebut akan berpengaruh terhadap pariwisata di wilayah NTT.

"Perkembangan kejahatan begitu cepat seperti tindak pidana penjualan orang, tindak pidana narkotik, tindak pidana pertanahan, terutama pada Narkotika yang di mana ini merupakan daerah strategis dan ini perlu diawasi secara ketat," kata Jacki Uly kepada **Parlementaria**, usai Kunjungan Kerja Spesifik di Labuan

Bajo, Provinsi NTT, Jumat (16/6).

Dirinya menyampaikan bahwa Komisi III DPR memberikan atensi terhadap persoalan narkoba sesuai dengan tujuan kunjungan kerja Tim Komisi III DPR RI ke NTT. Sebab, hal ini terkait keberlangsungan dari proyek strategis nasional di bidang pariwisata.

"Ini peredaran narkoba jadi salah satu ancaman serius dalam kemajuan NTT yang diketahui sebagian besar pendapatan ekonomi masyarakat bergantung di bidang pariwisata," ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Di sisi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT beserta jajarannya telah

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022. Walaupun dengan keterbatasan sarana prasarana, namun Jacky Uli menilai melalui berbagai strategi yang diterapkan maka pelayanan terbaik dapat diperoleh masyarakat NTT.

"Perlunya dukungan penuh dari seluruh komponen yang ada, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur," jelas Legislator Dapil NTT ini.

— gys/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Labuan Bajo, Provinsi NTT, Jumat (16/6/2023).

FOTO: GYS/PDT

Kampung Nelayan Terdampak Kerusakan Lingkungan, Pemerintah Perlu Beri Perhatian Khusus



FOTO: LUPI/PDT

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/06/2023).

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kampung nelayan yang terkena kerusakan lingkungan. Ia menilai kerusakan lingkungan ini harus jadi perhatian pemerintah karena dapat merugikan nelayan.

"Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perekonomian di pesisir dan laut, termasuk di dalamnya pengelolaan hasil sedimentasi laut, merupakan hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah. Mengingat permasalahan ini sangat berdampak kepada kegiatan

perikanan tangkap oleh nelayan, yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kesejahteraan nelayan," ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/6).

Sudin juga menambahkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah, seperti kebersihan pengelolaan tempat pelelangan ikan. Sebab, hal itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Permasalahan kebersihan, seperti banyaknya sampah dan limbah sisa atau buangan dari aktivitas-aktivitas di tempat pelelangan ikan, menurutnya, secara tidak langsung dapat

menimbulkan pencemaran.

Nantinya, hasil dari kunjungan kerja ini nantinya dapat menjadi dasar bagi Komisi IV DPR RI dalam menyusun kebijakan dan memperjuangkan langkah-langkah penanggulangan pencemaran serta perlindungan lingkungan, khususnya yang ada di Tambak Lorok Semarang dan wilayah-wilayah sekitarnya.

"Saya pikir apa yang sudah dikerjakan di program kemudian sudah dikeluarkan kebijaksanaan terkait dengan kampung nelayan di Tambak Lorok ini sudah *on the track*, sudah benar, tentunya harus dikerjakan secara bertahap," tutupnya

 [upi/rdn](https://www.upi.com)

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Perbaiki Jalan Daerah Berkat Peran Penting Komisi V Lahirkan UU Jalan

Perbaikan jalan daerah yang tengah berlangsung di Jalan Simpang Randu-Seputih Raman, Lampung

Tengah, tidak lepas dari peran penting Komisi V DPR RI yang merumuskan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dimana kemudian disusul keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada bulan Maret 2023

Sebagaimana diketahui, Inpres Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada bulan Maret 2023 tersebut merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (4) merupakan afirmasi Pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan pemantapan jalan daerah, sekaligus untuk menjaga terwujudnya pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

"(Pembangunan jalan) ini tidak terlepas dari lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini. Dari itu, lahirlah Inpres 3 Tahun 2023. Nah dari inilah, ada hal-hal yang terbuka untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka membangun yang seyogyanya selama ini ada pembagian tugas yang jalan daerah adalah Pemerintah Pusat, jalan provinsi adalah Gubernur dan jalan kabupaten adalah Bupati," ujar

Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri usai memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Lampung Tengah, Kamis (22/6).

"Nah sekarang tidak seperti itu, yang tidak mungkin lagi dapat di-handle oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, ditekel oleh Pemerintah Pusat. Nah ini sekarang dengan adanya Inpres Nomor 3 itu se-Indonesia kebagian Rp32,7 triliun. Alhamdulillah syukur, di Lampung sudah kebagian 800. Nah oleh karena itu, kita manfaatkan sepenuh-penuhnya sebaik-baiknya agar (perbaiki) 15 titik yang sudah disampaikan oleh Presiden bisa

dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berkualitas," sambung Tamanuri menegaskan.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Lampung II ini kembali mengingatkan agar pembangunan jalan daerah di tingkat kabupaten bisa bertahan lama dengan kualitas dan daya tahan tinggi. Mengingat, diharapkan melalui Inpres melahirkan manfaat jangka panjang yang berkesinambungan. "Sehingga jalan jalan yang tadinya pada rusak segala macam walaupun tidak sempurna yang kita harapkan, tapi sudah meningkat," pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

— pun/aha



FOTO: PUN/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Lampung Tengah, Kamis (22/6/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bangga Karya Anak Bangsa, Komisi VI Apresiasi PTDI Komersialisasi Pesawat N219



FOTO:TRAV/PTDI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal beserta tim saat foto bersama usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PTDI, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/6/2023).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal mengapresiasi

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Persero menciptakan pesawat N219 sebagai hasil karya anak bangsa yang didesain hingga diproduksi untuk dikomersialisasi. Untuk diketahui komersialisasi pesawat N219 oleh PTDI dimanfaatkan untuk meningkatkan konektivitas dalam rangka pemerataan ekonomi daerah

"PTDI telah berhasil menciptakan pesawat pertama yang benar-benar didesain dan diproduksi sampai akhir oleh putra-putri bangsa, sudah sertifikasi dan sudah siap komersialisasi. Pesawat N219 ini rasanya bisa jadi primadona karena

harga yang kompetitif," jelas Hekal usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PTDI, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/6).

Politisi partai Gerindra itu menambahkan desain pesawat N219 yang dirancang dengan ukuran jendela yang cukup besar, kemampuan jelajah yang cukup bagus, serta kemampuan lepas landas di rumput sekalipun dengan jarak yang cukup pendek, cocok untuk Indonesia sebagai negara yang berfokus pada pengembangan pariwisatanya.

"Saya rasa ini sesuatu yang patut kita banggakan. Kita harus kawal terus kinerja PTDI, mudah-mudahan dengan *support*, dukungan dari pemerintah dan DPR, PTDI ke depan mampu mensuplai kebutuhan

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas apa yang kita perlukan untuk pengembangan pertahanan di Indonesia dan komersialisasi pesawat di Indonesia," pungkas Hekal.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan pada sambutannya melaporkan kinerja bisnis dan keuangan PTDI periode tahun 2020-2022, termasuk perkembangan dan potensi perolehan kontrak militer domestik, potensi pesawat N219, potensi ekspor, serta bagaimana kontribusi PTDI bagi daerah, baik melalui program pesawat N219, maupun terobosan dalam program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Perusahaan.

"Kami telah berupaya banyak membangun kinerja bisnis dan keuangan, dari dampak COVID-19 yang sangat mempengaruhi kinerja PTDI di tahun 2020-2021, hingga bisa kembali bangkit di tahun 2022. Saat ini kinerja kami sudah mulai terlihat peningkatan dan di tahun 2023 terlihat ada hoping untuk capaian kontrak yang akan semakin meningkat, hingga Renstra sampai tahun 2024 dapat kami selesaikan," ungkapnya.

Pesawat N219 merupakan hasil karya anak bangsa telah dipilih sebagai wahana transportasi udara yang akan mendukung program transformasi ekonomi di Kepri. Adapun tindak lanjut pesawat N219 kedepan di Kepri adalah kegiatan *road show* dan menerbangkan pesawat N219 ke beberapa Kabupaten di wilayah Kepri.

tra/aha



Pengenaan PPN 11 Persen Pada Produk Pengolahan Setengah Jadi Tidak Adil

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suprawoto menilai pengenaan PPN sebesar 11 persen pada produk pengolahan setengah jadi (intermediat) dari nikel menjadi *stainless steel* atau dari timah menjadi ingot (batang logam) tidak adil.

"Memang ini sangat-sangat dikeluhkan industri dalam negeri yang mau memakai produk turunan dari nikel. Harus dipajaki 11 persen, sementara kalau ekspor malah tidak dikenakan 11 persen.

”

MEMANG INI SANGAT-SANGAT DIKELUHKAN INDUSTRI DALAM NEGERI YANG MAU MEMAKAI PRODUK TURUNAN DARI NIKEL.

Kan tidak adil ini. Daya saing barang dalam negeri jadi lebih mahal 11 persen," ujar Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan pengelola kawasan industri, di Ruang Rapat Komisi VII, Senayan Jakarta, Selasa (20/6).

Oleh Karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini meminta

Kemenperin untuk mengusulkan peninjauan atas pengenaan PPN

sebesar 11 persen pada produk pengolahan setengah jadi. Hal itu semata untuk mendorong industri pengolahan lanjutan yang lebih kompetitif.

Dalam kesempatan itu, Komisi VII juga mendesak Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Ditjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII) untuk melakukan industrialisasi di setiap kawasan industri, dengan menumbuhkan industri turunan produk nikel dan timah.

Selain itu Komisi VII DPR juga meminta Kemenperin, khususnya kedua Direktorat tersebut untuk membuat perencanaan pengembangan kawasan industri terintegrasi. Dalam point kesimpulan rapat kali ini, Komisi VII juga meminta Kemenperin untuk memastikan izin-izin kawasan industri bersih serta bebas sengketa lahan.

"Komisi VII juga meminta Kemenperin mengembangkan roadmap pengembangan kawasan industri strategis yang berbasis karakteristik unggulan lokal serta mengembangkan roadmap hilirisasi," tambah Sugeng.

Sugeng juga menegaskan bahwa Komisi yang dipimpinnya itu akan mendorong Kemenperin untuk memastikan pengelola kawasan industri tidak hanya memfasilitasi penyewa bermodal besar. Melainkan juga pada pelaku IKM dan UMKM dalam rangka mengembangkan industri turunan dan rantai pasok komoditas unggulan kawasan.

ayu/aha



FOTO: NIKRI/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suprawoto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan pengelola kawasan industri, di Ruang Rapat Komisi VII, Senayan Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Soroti Bisnis BBM Ilegal, Komisi VII Bakal Bentuk Tim Panja

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Patra Niaga Medan untuk memperoleh informasi komprehensif terkait kondisi terkini penanganan kasus penimbunan BBM ilegal.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar dan pertalite yang terjadi di tengah masyarakat. Terungkap, beberapa bisnis bahan bakar minyak (BBM) ilegal dilakukan dengan sejumlah modus. Salah satunya dengan menampung solar subsidi untuk dijual ke industri.

Salah satu kasus penimbunan BBM ilegal yakni yang terjadi di Sumatera Utara menyebutkan bahwa gudang yang dijadikan tempat penimbunan bbm ilegal jenis solar. Menurut Eddy, maraknya dugaan

penyalahgunaan solar subsidi tersebut menurut Eddy bisa saja terjadi di berbagai daerah. Untuk itu, Komisi VII akan membentuk Panja.

"Topik pembahasan ini akan kita dalam bentuk Panja supaya permasalahan yang ada di Sumatera Utara ini, yang juga berpeluang terjadi di tempat lain di seluruh Indonesia bisa tertangani dengan baik dan mereduksi kebocoran dan penyalahgunaan BBM itu secara sangat signifikan," ungkap Eddy usai pertemuan di Gedung Pertamina MOR I Office, Medan, Sumatera Utara, Kamis (15/6).

Lebih lanjut, Politisi dari F- PAN ini juga menyoroti pengawasan penyaluran BBM yang dilakukan BPH Migas yang dirasakan belum efektif. Nantinya, Panja yang dibentuk juga akan memperkuat peran BPH Migas.

”

TETAPI MEMANG KITA PERLU SEGERA MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN HUKUM SUPAYA KEBOCORAN YANG ADA DI LAPANGAN INI BISA KITA HENTIKAN.

"Jika memang ada kebutuhan untuk penganggaran yang lebih besar lagi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan itu juga sepenuhnya akan kami dukung. Tetapi memang kita perlu segera melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum supaya kebocoran yang ada di lapangan ini bisa kita hentikan paling tidak bisa kita kurangi secara signifikan," kata Eddy.

Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul mendorong adanya reformasi struktur BPH Migas untuk memperkuat pengawasan pengelolaan migas sehingga tepat sasaran. "Kita mengharapkan BPH Migas membuat pola baru dalam pengawasan dan kita sangat merekomendasikan apabila ada penambahan anggaran BPH Migas khusus untuk melakukan pengawasan BBM yang bersubsidi," ungkap Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Lebih lanjut, Hendrik juga meminta BPH Migas mengungkap perusahaan yang bermain maupun oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi solar maupun pertalite. **ann/aha**

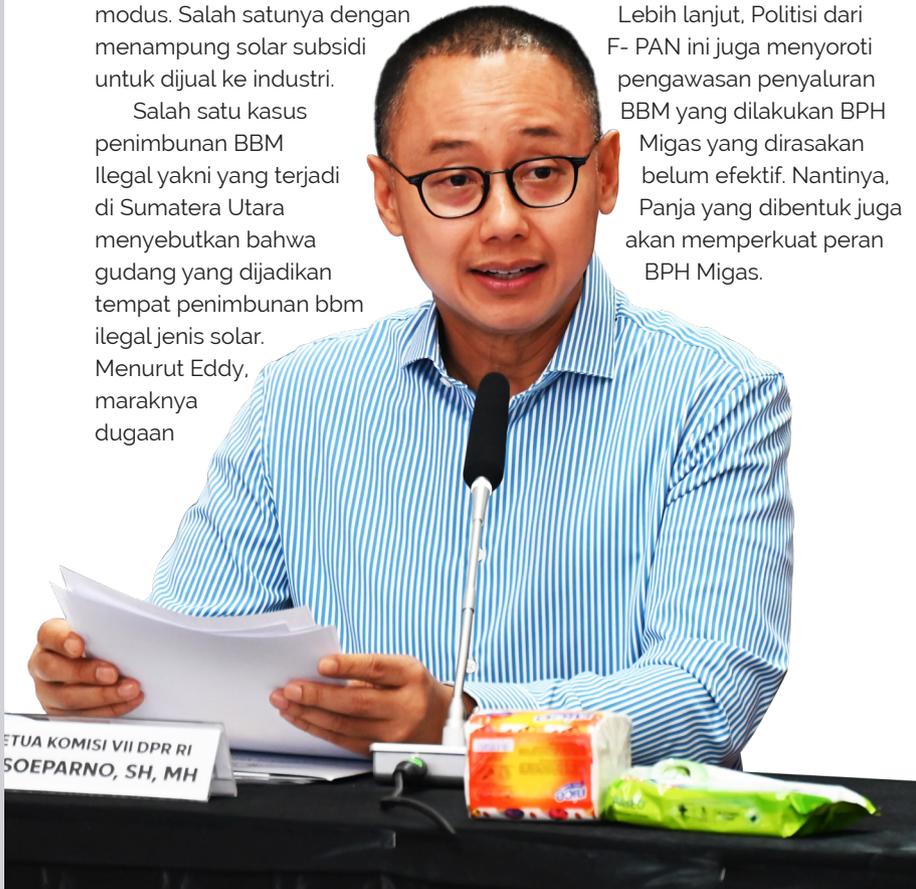


FOTO:ANE/PDI

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin pertemuan kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Patra Niaga Medan, Sumatera Utara, Kamis (15/6/2023).



Komisi VIII Minta Verifikasi Data Penerima Bansos Tetap Diawasi



FOTO: SYN/PDI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Dinas Sosial Provinsi DIY, Yogyakarta, Senin, (26/6/2023).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY) atas usahanya dalam menangani kemiskinan ekstrim di DIY. Hal ini ia sampaikan usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Dinas Sosial Provinsi DIY, Yogyakarta, Senin, (26/6).

"Kami datang kesini untuk mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai stunting dan kemiskinan.

Begitu besar niat pemerintah daerah untuk mengentaskan tentang stunting. Namun masih ada berbagai hal yang harus diselesaikan secara internal. Yang tadi kita tangkap semuanya untuk sama sama secara internal akan memperbaiki apa yang kurang. Tapi hal yang lain akan kita bawa ke DPR RI nanti untuk kita bahas bersama," ungkap Moekhlas kepada **Parlementaria**.

Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, I Komang Koheri, ia menilai salah satu program unggulan Dinsos DIY, yakni program pendaftaran mandiri untuk penerima

bantuan sosial sangat baik dan perlu untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

"Kalau kalau kita melihat tadi ada ada memang pemerintah DIY ini mempunyai juga bantuan yang khusus ya Karena tidak semua juga bisa ditahan oleh pemerintah pusat tadi ya perbandingan antara Angka kemiskinan lebih tinggi daripada bantuan PKH dan sisanya itu adalah juga tanggung jawab daripada pemerintah DIY dengan pemerintah Kabupaten maupun kota," tambah Koheri.

Walaupun program tersebut patut mendapat apresiasi, banyak hal-hal yang perlu dilakukan agar pendaftaran mandiri bansos ini tak disalahgunakan. Hal itulah yang digaris bawahi oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayati, ia menilai verifikasi mendasar perlu dilakukan disamping pengawasan saat penyaluran bansos tersebut.

"Ada kecenderungan *iki sedulurku, iki sing tak* utamakan itu kan yang ditakutkan. Ini bukan bahasa saya ya. Ini bahasa ketika saya turun ke rakyat. Tetapi pendaftaran mandiri sejauh ini ada verifikasi yang jelas. Tadi sudah menyaksikan kemungkinan ada level dari bawah (RT/RW/Desa). Jadi nanti juga ada sampai seperti itu. Saya kira itu nanti bisa menjadi hal yang cukup bagus, asalkan semua punya komitmen yang sama. Bahwa yang saya lakukan ini adalah memang untuk pendataan sebenarnya bagi mereka yang memang membutuhkan program yang bukan bantuan karena memang masuk dalam kategori tidak dengan verifikasi," tutup My Esti.

syn/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Terima Audiensi DPRD Banyumas, Edy Wuryanto Jelaskan Posisi Organisasi Profesi dalam RUU Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menjelaskan organisasi profesi akan diatur ulang dalam RUU Kesehatan. Menurutnya, hal ini untuk membantu pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang lebih murah dan efisien.

Hal tersebut disampaikan pada **Parlementaria**, usai Komisi IX DPR RI menerima audiensi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam rangka

”

ITU URUSAN OP, BAGAIMANA DIA BERJUANG DENGAN STAKEHOLDER DENGAN PEMERINTAH JADI KEBERADAAN OP SESUAI DENGAN FITRAHNYA.

menyampaikan aspirasi dan tuntutan Organisasi Profesi (OP) tenaga kesehatan Kabupaten Banyumas terkait dengan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin, (26/6).

"Enam instrumen (Pemerintah, Konsil, Kolegium, Komite, Majelis Disiplin, dan Organisasi Profesi) ini (kebijakannya) diatur ulang, jangan sampai tabrakan karena kalau benturan merugikan nakesnya sendiri, berbelit-belit, tidak efisien, biayanya mahal, pendidikannya mahal ini yang tidak diinginkan oleh negara karena itu memang banyak wewenang organisasi profesi," jelasnya.

Disampaikan Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, organisasi profesi tidak banyak diatur dalam undang-undang sehingga perlu juga diatur lebih jelas. Terlebih menurutnya, organisasi profesi haruslah bisa membina etika moral hingga bisa membantu anggotanya mencapai tingkat kompetensi tertentu dengan baik.

"Dia harus banyak mendampingi SDM kesehatan untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu yang dipersyaratkan untuk memperoleh STR, juga *welfare*, (memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, jangan sampai tenaga kesehatan digaji di bawah UMR. Itu urusan OP, bagaimana dia berjuang dengan *stakeholder* dengan pemerintah jadi keberadaan OP sesuai dengan fitrahnya," tutupnya. [we,del/aha](https://www.del.aha)



FOTOMIN/PDI

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat menerima audiensi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin, (26/6/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi IX: Pemerintah Segera Respon dan Tentukan Kuota Pekerja Pertanian Indonesia ke UK



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat foto bersama usai menerima audiensi Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah memberikan respon cepat terhadap kebutuhan kuota para pekerja musiman (*seasonal worker*) pertanian asal Indonesia menuju Britania Raya (UK) tahun 2023. Respon cepat ini dinilai penting, karena berkaitan dengan musim panen di UK yang diperkirakan akan jatuh pada bulan Juli namun hingga saat ini para pekerja migran belum bisa berangkat karena ketidakjelasan kuota.

"Sami hari ini belum mendapatkan umpan balik informasi,

”

SAYA RASA INI HARUSNYA DIRESPON DENGAN SANGAT CEPAT DENGAN SANGAT SERIUS

nah ini yang mungkin yang perlu dibantu oleh pemerintah Indonesia ke pemerintah dari UK-nya, khususnya perusahaan terkaitnya, kebutuhannya berapa, kapan dibutuhkannya, sehingga teman-teman di sini bisa segera siap-siap, dan pemerintah juga bisa siap-siap," jelasnya usai Komisi IX DPR menerima audiensi Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), di Gedung

Nusantara I, Jakarta, Senin (26/6).

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, banyaknya kebutuhan negara lain terhadap para *seasonal worker* ini bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia mengatasi minimnya peluang kerja dan tinggi angka pengangguran di Indonesia. "Jadi harusnya ini menjadi perhatian, ketika ini ada peluang ada potensi yang sangat bagus dan dengan pendapatannya juga sangat luar biasa, proteksinya juga bagus, saya rasa ini harusnya direspon dengan sangat cepat dengan sangat serius," jelasnya.

Terlebih, UK juga dinilai sebagai negara yang cukup menjanjikan dan baik dalam perlindungan kepada pekerja migran. "Ini satu potensi dan peluang yang sangat besar untuk diperhatikan oleh pemerintah Indonesia bahwa ada satu negara yang selalu membutuhkan di musim-musim panen untuk mengirimkan tenaga yang tidak perlu terlalu *high skill* juga, bahasa juga enggak perlu jadi masalah, selama ini kan kita selalu ada problem ketika pengiriman PMI itu harus di *skillable*, terus bahasanya, misalnya Korea harus bahasa Korea, Jepang harus Bahasa Jepang, itu menjadi tantangan," katanya.

Untuk itu, Kurniasih menyampaikan Komisi IX selalu mendukung terkait perjuangan para pekerja migran musiman dan mendorong pemerintah untuk segera merespon dan menentukan kuota pekerja tersebut yang akan diberangkatkan ke UK. Apalagi, menurutnya PMI sangat berjasa sebagai pahlawan devisa negara.

[we/aha](#)

FOTO: MUN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Legislator: PON XXI Aceh-Sumut Perlu Dukungan Anggaran

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsppek) Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan 34 cabang olahraga wilayah Sumut dalam PON Sumatera Utara memerlukan banyak anggaran. Hal ini mengingat persiapan PON XXI yang diselenggarakan di Aceh-Sumut ini harus dipersiapkan dengan matang.

"Karena, memang mereka harus menyiapkan *venue* dari jarak jauh. Terus kemudian, juga bagaimana mereka bisa mempersiapkan ini?" ucap Ledia kepada **Parlementaria** usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsppek) Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Selasa (27/6).

"Jadi memang, kalau kita mau mengimplementasikan desain besar olahraga nasional memang harus lebih *streak*, bagaimana kedepannya. Tetapi tentu, ini adalah sebuah perhelatan yang harus kita pikirkan," sambungnya.

Lebih lanjut, kata Politisi Fraksi PKS itu, menyebut juga mewanti-wanti agar pembangunan *venue* dalam peraiapan PON tidak sia-sia kedepannya. "Lalu kita punya *venue-venue*, nanti tidak mubazir. Bagaimana bisa menyambungkan dengan pendidikan dan juga, ketika *event-nya* berlangsung, kita harusnya bisa

”

NAH, KITA BELAJAR DARI BANYAK EVENT PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) YANG DIBANGUN



FOTO: AAS/PDT

Ketua Tim Kunsppek Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah saat bertukar cenderamata usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Selasa (27/6/2023).

menyambungkan dengan pariwisata," ujarnya.

"Nah, kita belajar dari banyak *event* Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dibangun, *venue-venue* olahraga yang bagus, tetapi kemudian tidak dipergunakan. Itu mubazir. Makanya, kemudian itu juga harus betul-betul dipastikan bahwa, sudah ada komunikasi dengan pihak kampus misalnya, terus kemudian untuk pembinaan pengembangan olahraga," kata Ledia.

Politisi PKS itu berpesan agar semua pihak bekerja lebih sistematis dan sinergis. Legislator Dapil Jawa Barat itu juga menegaskan ada Pekerjaan Rumah (PR) lain terkait dengan infrastruktur, sebab kemampuan daerah tentu tidak bisa

terlalu besar dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Di Komisi X DPR RI, kemarin dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sudah menganggarkan untuk peralatan di tahun 2024, tetapi kelihatannya memang kurang, karena jumlah cabang olahraganya sudah lebih dari 68," urainya.

"Kita berharap nanti dengan adanya tambahan anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terutama di spesifikkan untuk melakukan persiapan-persiapan perhelatan ini. Untuk wasit, pelatih, atlet, pengawas dan lain sebagainya itu bisa terpenuhi dari situ. Begitu." tutupnya. **aas/aha**



Sertifikasi Pemandu Wisata Akan Jadi Masukan RUU Kepariwisataan



FOTO: CAS/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/6/2023).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai masukan yang diberikan oleh para akademisi Universitas Ciputra sangat menarik, khususnya yang terkait dengan sertifikasi pemandu wisata (*tour leader/tour guide*) untuk menambah masukan atas RUU Kepariwisataan.

"Masukan sertifikasi ini penting, terkadang mereka yang punya sertifikasi itu tidak terpakai, kalah dengan yang tidak punya sertifikasi. Berbeda dengan di Turki dan Jerman, meskipun kita pakai *tour leader* tetapi yang menjelaskan yaitu *tour*

”

SESUNGGUHNYA SDM KITA INI SANGAT POTENSIAL DAN BAGUS, KARENA TIDAK DI-SUPPORT OLEH PIHAK LAIN JADI TIDAK ADA BANTUAN DAN KEKUATANNYA. INI AKAN KAMI MASUKAN DALAM NORMA RUU KEPARIWISATAAN.

leader dari negara tersebut," katanya kepada **Parlementaria** usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/6).

Politisi Fraksi PKS tersebut mengatakan bahwa sejauh ini sertifikasi *tour guide* bersifat lokal. Sehingga, jika ada seseorang yang memiliki sertifikasi *tour guide* yang ada di provinsi Jawa Timur, maka hanya diakui di Jawa Timur saja dan tidak berlaku di provinsi lain. Harusnya, menurut Fikri, hal ini diakui juga di provinsi lain.

"*Tour leader* yang datang dari ASEAN mereka tersertifikasi tingkat internasional. Sehingga ketika datang ke Indonesia tidak bisa ditolak, karena sertifikasi mereka diakui di sini, sementara sertifikasi kita yang dikeluarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) itu tidak diakui mereka," jelasnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah IX itu mengatakan bahwa hal tersebut merupakan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat serius. Tentunya masukan tersebut akan dibawa Komisi X DPR RI dan dimasukkan ke dalam RUU Kepariwisataan yang prosesnya saat ini akan segera rampung.

"Sesungguhnya SDM kita ini sangat potensial dan bagus, karena tidak di-*support* oleh pihak lain jadi tidak ada bantuan dan kekuatannya. Ini akan kami masukan dalam norma RUU Kepariwisataan," tutupnya.

[cas/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi XI Terima Pengantar RKA dan RKP BPK Tahun 2024

Komisi XI DPR RI menerima pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2024.

Dalam rapat yang diselenggarakan pada Kamis (22/6/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta tersebut disampaikan Pagu Indikatif BPK RI tahun 2024 adalah sebesar Rp4,6 triliun untuk pembiayaan program pemeriksaan keuangan negara dan dukungan manajemen.

"Hari ini kita terima tapi pembahasan dan penjelasan lebih lanjut akan dilakukan melalui rapat konsultasi BPK dengan Komisi XI sebelum tanggal 14 Juli. Hasil pembahasan itu akan kita sampaikan kepada menteri keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN. Jadi kita menjalankan amanat Undang-undang BPK pasal 35 juga," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP selaku pimpinan rapat.

Pada kesimpulan rapat, dijabarkan bahwa Pagu indikatif BPK RI sebagai usulan awal dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP saat memimpin rapat Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK RI di Gedung Nusantara II, Senayan.

”

HARI INI KITA TERIMA TAPI PEMBAHASAN DAN PENJELASAN LEBIH LANJUT AKAN DILAKUKAN MELALUI RAPAT KONSULTASI BPK DENGAN KOMISI XI SEBELUM TANGGAL 14 JULI.

Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (RAPBN TA 2024) setelah usulan pergeseran sebesar Rp4.673.975.647.000. Selain itu, melalui paparan Sekretaris Jenderal BPK, disampaikan pula usulan tambahan anggaran sebesar Rp2.712.820.978.000.

Aturan mengenai Anggaran BPK RI termaktub dalam Pasal 35 dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada pasal tersebut dijabarkan bahwa (1)

Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN.

uc.del/rdn



Ada Potensi Penghematan APBN Jika Pengadaan Barang dan Jasa Dilakukan Sesuai Regulasi

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas menilai ada potensi penghematan APBN apabila proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6).

"Bila mana proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara benar, insyaallah APBN kita bisa hemat banyak. Saya tidak ngomong ini banyak permainan, tidak. Tapi, insyaallah kalau memang ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dilakukan secara benar. Benar menurut Bapak, benar menurut kita, saya yakin bisa penghematan APBN yang luar biasa," ungkap Bertu.

Dalam rapat dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) LKPP Tahun 2024 tersebut, secara gamblang ia menyampaikan bahwa LKPP memiliki tanggung jawab yang besar dengan anggaran yang kecil. Padahal, secara regulasi hampir semua belanja barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui lembaga tersebut.

Politisi PKB ini pun mengatakan bahwa secara pribadi, dirinya tidak akan mempermasalahkan permintaan tambahan anggaran yang diajukan LKPP pada rapat tersebut. Namun, ia menegaskan agar LKPP

”

**BILA MANA PROSES
PENGADAAN
BARANG DAN JASA
INI DILAKUKAN
SECARA BENAR,
INSYAALLAH APBN
KITA BISA HEMAT
BANYAK.**

dapat menjalankan tugasnya dengan menciptakan sistem yang baik dan diaplikasikan dengan berimbang serta bebas korupsi.

"Saya kira untuk anggaran (LKPP) kita enggak masalah pak, karena terlalu kecil untuk tanggung jawab seperti itu. Bagaimana bapak menciptakan pola? Menciptakan sistem di mana pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan secara baik dan benar dalam konsep apapun. *Fair* ada di situ, *zero* korupsi ada di situ, baik dan benar maksud saya tuh seperti itu pak," lanjut legislator Sumatera Selatan tersebut pada Kepala LKPP, Hendrar Prihadi.

Sebelumnya, Hendar menyampaikan pagu indikatif tahun 2024 dari LKPP sebesar Rp193.467.598.000 yang dibagi untuk peruntukan Dukungan Manajemen dan Pengadaan Barang/Jasa Nasional. Melalui rapat tersebut, ia pun mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp32,56 miliar yang akan digunakan untuk kegiatan kolaborasi dan sosialisasi bersama *stakeholder* dalam rangka mendukung peningkatan penggunaan PDN dan peran UMK-K serta percepatan penyerapan belanja melalui e-Katalog dengan kurang lebih 50 titik lokasi. [uc/rdn](#)



FOTO: MUN/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Scan QR
untuk berita
selengkapny



Baleg Serap Masukan API dan APINDO Bahas Sektor Sandang Diatur dalam UU



Wakil Ketua Baleg DPR RI Abdul Wahid saat foto bersama usai RDPU Baleg DPR RI dengan Asosiasi Perlembagaan Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abdul Wahid menyampaikan pentingnya sektor sandang diatur dengan jelas dalam sebuah undang-undang. Hal tersebut melihat dari kebutuhan dasar manusia yakni sandang, pangan, dan papan. Namun, hingga saat ini belum ada aturan jelas yang mengatur mengenai sektor sandang.

Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Asosiasi Perlembagaan Indonesia (API) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam rangka pemantauan dan peninjauan UU yang terkait dengan sandang, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6).

"Kebutuhan dasar kita itu sandang, pangan, dan papan. Ternyata dua hal yang lain sudah diatur secara jelas dan rinci bahkan dulu pernah ada namanya Menteri Perumahan Rakyat, itu merupakan kewajiban kita terhadap tempat tinggal. Sementara kita memandang sandang ini ya kita memasukan kategori ke industri atau apa?" tanya Politisi Fraksi PKB itu.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada aturan yang jelas mengatur tentang sektor sandang. Untuk itu, dalam RDPU tersebut, Baleg DPR ingin mendapatkan masukan dari API dan APINDO terkait sektor sandang. Mulai dari sisi industri, perdagangan hingga teknologi. Termasuk kendala yang dialami di sektor sandang selama ini. RDPU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk memperkuat

sektor sandang di Indonesia.

"Hari ini kita diskusi dari sisi industrinya dan dari sisi perdagangannya. Apa kendala teman-teman asosiasi, apa kendala dunia usaha baik itu UKM, karena dengan perkembangan teknologi hari ini, pasar bisa masuk ke mana saja, terutama di Indonesia dan apa yang disebutkan tadi, (bahwa) gara-gara (ada layanan pesan makanan) online tingkat produksi sampah kita juga meningkat karena bungkus segala macamnya itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan Indonesia perlu membuat Badan Sandang yang dibutuhkan untuk dapat melindungi sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). "Jadi kita sangat berharap bahwa perlindungan terhadap industri TPT ini sangat dibutuhkan mungkin ekosistem kita jangan sampai rontok, untuk dibangunnya lagi itu sangat susah," katanya.

Diketahui, Asosiasi Perlembagaan Indonesia (API) merupakan organisasi yang mewadahi perusahaan-perusahaan di sektor industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) adalah organisasi yang mewadahi pengusaha dan perusahaan di Indonesia. APINDO bertujuan untuk melindungi, mempromosikan, dan memperjuangkan kepentingan para pengusaha Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

 **bia/rdn**





Kolaborasi DKM Baiturrahman, Setjen DPR Tebar Hewan Kurban



FOTO: FHN/PDT

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Suprihartini saat kegiatan penyerahan hewan kurban dalam rangka merayakan Hari Raya Iduladha 1444 H, di halaman Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar penyembelihan hewan kurban dalam rangka merayakan Hari Raya Iduladha 1444 H, di halaman Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/6).
Ketua Korps Pegawai Republik

Indonesia (Korpri) DPR RI Djaka Dwi Winarko mengungkapkan, jumlah hewan kurban yang disembelih mencapai sebanyak 16 ekor sapi dan 13 ekor kambing hasil kolaborasi Korpri dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturrahman DPR RI.
"Ya alhamdulillah ya, hari ini kita dari DKM dan Korpri kita nyembelih

hampir ada 16 sapi dan 13 kambing. Jadi ada peningkatan lah kalau dibandingkan tahun yang lalu terutama dari jumlah kambingnya. Tapi yang paling penting itu tadi makna peringatan (Iduladha)," ujar Djaka saat diwawancarai **Parlementaria** usai salat Iduladha, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Djaka menegaskan makna kurban di Hari Raya Idul Adha dari sisi sosial juga merupakan salah satu bukti umat melakukan kohesi sosial antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Kohesi sosial itu dibuktikan dengan adanya penyaluran daging hewan kurban kepada para pekerja seperti pegawai taman, *Office Boy* (OB) dan *Cleaning Service* maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar Sekretariat Jenderal DPR RI. **pun/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TURUT BERDUKA CITA YANG SEDALAM DALAMNYA ATAS WAFATNYA

H. Desmond Junaidi Mahesa, SH, MH.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI
SABTU, 24 JUNI 2023

Alamat duka

Jl. Saco 1 No.1, RT.1/RW.4, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550

"Semoga Amal Ibadahnya diterima disisi Allah SWT.
dan Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan ketabahan"





**SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
mengucapkan**

Selamat Hari Raya
Idul Adha

10 DZULHIJAH 1444 H/2023 M



**Semoga dengan datangnya peringatan Hari Kurban ini,
bisa mengajarkan kita arti sebuah keikhlasan.**



@dpr_ri



DPR RI



@DPR RI



DPR RI



@dpr_ri